

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode April sampai Juni 2026 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan, distribusi, musim panen, serta perubahan permintaan masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan harga di Pasar Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagian besar komoditas strategis masih berada dalam kondisi relatif stabil. Namun demikian, beberapa komoditas hortikultura mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi sehingga menjadi penyumbang utama perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Kelompok komoditas yang paling berfluktuasi selama periode tersebut adalah cabai merah keriting, cabai rawit hijau, bawang merah, tomat, bawang putih, serta beberapa komoditas pangan segar lainnya. Sementara itu, komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, kedelai, dan daging sapi relatif stabil karena pasokan masih mencukupi dan distribusi berjalan dengan baik.

Memasuki bulan April 2026, harga beberapa komoditas mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kelompok komoditas hortikultura menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Harga bawang merah meningkat dari Rp33.000/kg menjadi Rp38.000/kg, sedangkan bawang putih naik menjadi Rp34.000/kg. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca dan meningkatnya biaya distribusi.

Komoditas cabai merah keriting mengalami penurunan hingga mencapai Rp18.000/kg, sebelum kembali naik menjadi sekitar Rp25.000/kg menjelang akhir bulan. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya volatilitas harga cabai yang sangat dipengaruhi oleh produksi harian dan distribusi antarwilayah.

Selain itu, harga ayam kampung meningkat menjadi Rp75.000/ekor, sedangkan harga sayuran seperti sawi hijau dan kangkung naik dari Rp5.000/kg menjadi Rp8.000/kg. Peningkatan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi.

Sebaliknya, harga beras medium mengalami penurunan menjadi Rp13.000/kg, sementara beras premium turun menjadi Rp15.000/kg, mencerminkan kondisi pasokan beras yang relatif melimpah setelah musim panen.

Tabel 1. Faktor Pendorong Inflasi Bulan Maret-April 2026

No	Komoditas	Harga Maret	Harga April	Perubahan
1	Bawang Merah	Rp33.000	Rp38.000	▲ Rp5.000 (15,15%)
2	Gula Pasir Curah	Rp17.000	Rp18.000	▲ Rp1.000 (5,88%)
3	Bawang Putih Honan	Rp30.000	Rp34.000	▲ Rp4.000 (13,33%)
4	Susu Kental Manis	Rp12.500	Rp13.000	▲ Rp500 (4,00%)
5	Pisang Lokal	Rp10.000	Rp12.000	▲ Rp2.000 (20,00%)
6	Jeruk Lokal	Rp13.000	Rp15.000	▲ Rp2.000 (15,38%)
7	Ayam Kampung	Rp65.000	Rp75.000	▲ Rp10.000 (15,38%)
8	Tomat	Rp9.000	Rp10.000	▲ Rp1.000 (11,11%)
9	Sawi Hijau	Rp5.000	Rp8.000	▲ Rp3.000 (60,00%)
10	Kangkung	Rp5.000	Rp8.000	▲ Rp3.000 (60,00%)

Tabel 2. Faktor Pendorong Deflasi Bulan Maret-April 2026

No	Komoditas	Harga Maret	Harga April	Perubahan
1	Beras Medium	Rp14.000	Rp13.000	▼ Rp1.000 (-7,14%)
2	Beras Premium	Rp15.500	Rp15.000	▼ Rp500 (-3,23%)
3	Cabai Merah Keriting	Rp27.000	Rp25.000	▼ Rp2.000 (-7,41%)
4	Cabai Rawit Hijau	Rp28.000	Rp24.000	▼ Rp4.000 (-14,29%)
5	Ikan Tongkol	Rp45.000	Rp43.000	▼ Rp2.000 (-4,44%)

Pada periode April hingga Mei 2026, tekanan inflasi kembali meningkat seiring naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan cuaca, meningkatnya biaya distribusi, serta berkurangnya pasokan dari sentra produksi.

Komoditas yang memberikan tekanan inflasi terbesar adalah tomat, yang mengalami kenaikan harga dari Rp10.000/kg menjadi Rp17.000/kg atau meningkat sekitar 70,00%. Kenaikan ini terjadi akibat produksi yang menurun karena curah hujan tinggi serta serangan hama pada sebagian lahan pertanian.

Selain tomat, cabai merah keriting meningkat sebesar 20,00%, sedangkan cabai rawit hijau naik 16,67%. Kedua komoditas tersebut merupakan penyumbang utama inflasi kelompok makanan bergejolak (*volatile food*) karena sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan harian.

Harga beras medium juga meningkat sebesar 6,15%, sedangkan beras premium naik 3,33%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian harga gabah di tingkat petani setelah berakhirnya masa panen raya.

Sementara itu, komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi relatif lebih sedikit. Daging ayam ras mengalami penurunan harga sebesar 2,38%, sedangkan udang basah turun sekitar 4,55% akibat meningkatnya pasokan hasil budidaya dan hasil tangkapan nelayan.

Secara keseluruhan, pada periode April-Mei 2026 tekanan inflasi lebih dominan dibandingkan tekanan deflasi. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura masih menjadi faktor utama penyebab fluktuasi harga pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 3. Faktor Pendorong Inflasi Bulan April-Mei 2026

No	Komoditas	Harga April	Harga Mei	Perubahan
1	Beras Medium	Rp13.000	Rp13.800	▲ Rp800 (6,15%)
2	Beras Premium	Rp15.000	Rp15.500	▲ Rp500 (3,33%)
3	Cabai Merah Keriting	Rp25.000	Rp30.000	▲ Rp5.000 (20,00%)

No	Komoditas	Harga April	Harga Mei	Perubahan
4	Cabai Rawit Hijau	Rp24.000	Rp28.000	▲ Rp4.000 (16,67%)
5	Tomat	Rp10.000	Rp17.000	▲ Rp7.000 (70,00%)
6	Ikan Tongkol	Rp43.000	Rp45.000	▲ Rp2.000 (4,65%)
8	Beras Medium	Rp13.000	Rp13.800	▲ Rp800 (6,15%)

Tabel 4. Faktor Pendorong Deflasi Bulan April-Mei 2026

No	Komoditas	Harga April	Harga Mei	Perubahan
1	Daging Ayam Ras	Rp42.000	Rp41.000	▼ Rp1.000 (-2,38%)
2	Udang Basah	Rp110.000	Rp105.000	▼ Rp5.000 (-4,55%)

Perkembangan harga kebutuhan pokok selama Mei hingga Juni 2026 menunjukkan peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan harga didominasi oleh kelompok komoditas hortikultura yang memiliki volatilitas tinggi.

Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah cabai merah keriting. Harga meningkat dari Rp30.000/kg menjadi Rp44.000/kg atau sekitar 46,67%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh menurunnya produksi akibat cuaca yang kurang mendukung, meningkatnya biaya distribusi, serta tingginya permintaan masyarakat.

Selain itu, cabai rawit hijau meningkat sebesar 14,29%, bawang merah naik 5,26%, dan bawang putih Honan meningkat sekitar 5,88%. Kenaikan harga bawang dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah pemasok utama serta meningkatnya biaya transportasi.

Komoditas Minyakita juga mengalami kenaikan harga sekitar 5,52%, yang diperkirakan merupakan dampak penyesuaian harga distribusi di tingkat pengecer.

Di sisi lain, tekanan deflasi berasal dari beberapa komoditas protein hewani dan hortikultura. Udang basah mengalami penurunan harga sebesar 4,76%, sedangkan daging ayam ras turun sekitar 2,44% akibat meningkatnya pasokan peternak lokal. Komoditas tomat juga mengalami penurunan harga sekitar 5,88% setelah memasuki masa panen baru.

Secara umum, periode Mei-Juni 2026 menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih didominasi oleh kelompok volatile food, khususnya cabai dan bawang. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif berupa penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peningkatan kelancaran distribusi pangan, pemantauan stok harian, serta pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi mengganggu stabilitas harga di tingkat konsumen.

Tabel 5. Faktor Pendorong Inflasi Bulan Mei-Juni 2026

No	Komoditas	Harga Mei	Harga Juni	Perubahan
1	Cabai Merah Keriting	Rp30.000	Rp44.000	▲ Rp14.000 (46,67%)
2	Cabai Rawit Hijau	Rp28.000	Rp32.000	▲ Rp4.000 (14,29%)
3	Bawang Merah	Rp38.000	Rp40.000	▲ Rp2.000 (5,26%)
4	Bawang Putih Honan	Rp34.000	Rp36.000	▲ Rp2.000 (5,88%)
5	Minyakita	Rp15.700	Rp16.567	▲ Rp867 (5,52%)

Tabel 6. Faktor Pendorong Deflasi Bulan Mei-Juni 2026

No	Komoditas	Harga Mei	Harga Juni	Perubahan
1	Daging Ayam Ras	Rp41.000	Rp40.000	▼ Rp1.000 (-2,44%)
2	Udang Basah	Rp105.000	Rp100.000	▼ Rp5.000 (-4,76%)
3	Tomat	Rp17.000	Rp16.000	▼ Rp1.000 (-5,88%)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah Berdasarkan Pendekatan 4K

1. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selama ini, pasokan beberapa komoditas strategis, khususnya kelompok hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan sayuran hijau masih sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim tanam, serta produktivitas lahan pertanian. Ketika terjadi curah hujan tinggi atau gangguan iklim lainnya, produksi petani mengalami penurunan sehingga pasokan di pasar menjadi terbatas dan memicu kenaikan harga.

Di samping itu, beberapa komoditas seperti bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Tapanuli Selatan rentan terhadap gangguan pasokan apabila terjadi hambatan produksi maupun distribusi dari daerah pemasok. Cadangan pangan pemerintah maupun stok distributor juga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode tertentu, seperti menjelang hari besar keagamaan atau hari besar nasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan produksi lokal, peningkatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan kerja sama antar daerah (KAD), serta penguatan sistem pemantauan stok pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga sepanjang tahun.

2. Keterjangkauan Harga

Keterjangkauan harga masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah karena harga beberapa komoditas pangan strategis menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat sering mengalami kenaikan harga yang signifikan akibat berkurangnya pasokan, meningkatnya biaya produksi, serta kenaikan biaya distribusi.

Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok

rumah tangga berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Meskipun beberapa komoditas seperti beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu relatif stabil, gejolak harga pada komoditas *volatile food* tetap menjadi penyumbang utama inflasi daerah.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID perlu memperkuat pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan, serta meningkatkan pemantauan harga harian agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi lonjakan harga.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga antarwilayah. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam sehingga distribusi pangan dari sentra produksi menuju pasar sering menghadapi kendala, terutama pada musim hujan yang dapat mengganggu akses transportasi.

Selain faktor infrastruktur, rantai distribusi yang masih relatif panjang menyebabkan biaya logistik meningkat sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat produsen. Informasi mengenai stok, distribusi, dan kebutuhan pasar juga belum sepenuhnya terintegrasi secara real time sehingga potensi gangguan distribusi sering terlambat terdeteksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peningkatan koordinasi distribusi antarinstansi, penguatan kerja sama perdagangan antar daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan distribusi, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung distribusi pangan.

4. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam pengendalian inflasi daerah karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Saat ini, penyampaian informasi perkembangan harga dan kondisi pasokan kepada seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan, akurasi, dan integrasi data.

Pemanfaatan Dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH), sistem pemantauan harga harian, serta *Early Warning System* (EWS) belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, komunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi harga, alternatif konsumsi pangan, dan upaya stabilisasi harga juga masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kepanikan yang dapat memicu peningkatan permintaan secara berlebihan (*panic buying*).

Ke depan, TPID perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui Dashboard IPH, Google Spreadsheet berbasis real time, EWS, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, dan media massa sehingga informasi perkembangan harga dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan strategis sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mengendalikan tekanan inflasi daerah. Kebijakan tersebut difokuskan pada implementasi strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pelaku usaha, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu kebijakan utama yang dilaksanakan adalah Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kerja sama ini bertujuan memperkuat ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis, khususnya cabai, bawang merah, dan beras, sekaligus menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah. Melalui skema Government to Government (G to G) dan Business to Business (B to B), pemerintah daerah berupaya membangun rantai pasok pangan yang lebih efisien sehingga mampu mengurangi risiko kekurangan pasokan dan menekan gejolak harga pada komoditas penyumbang inflasi. Pembahasan kerja sama tersebut juga menekankan pentingnya penguatan logistik, ketahanan pangan, serta keberlanjutan kemitraan antarwilayah.

Selain memperkuat pasokan melalui kerja sama antar daerah, TPID juga mendorong peningkatan produksi lokal melalui program Tanam Perdana Cabai Merah yang merupakan bagian dari Program Sumut Berkah. Kegiatan ini dilaksanakan pada lahan seluas sekitar 4 hektare dengan target produksi mencapai 40 ton pada musim panen berikutnya. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi cabai sebagai salah satu komoditas utama penyumbang inflasi pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta menjaga stabilitas harga ketika permintaan meningkat. Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah juga disiapkan guna meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan usaha budidaya cabai.

Upaya peningkatan produksi lokal juga diwujudkan melalui Tanam Perdana Bawang Merah di Kecamatan Sipirok. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas bawang merah sebagai salah satu komoditas strategis penyumbang inflasi, sekaligus mendorong pengembangan pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menempatkan program peningkatan produksi hortikultura sebagai langkah preventif dalam menjaga ketersediaan pasokan sehingga stabilitas harga dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Di bidang stabilisasi harga, TPID terus melakukan pemantauan harga harian melalui Dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH), pelaksanaan rapat koordinasi rutin, pemetaan komoditas penyumbang inflasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data. Pemanfaatan Dashboard IPH dan sistem Early Warning System (EWS) menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga sejak dini sehingga langkah intervensi, seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan koordinasi distribusi pangan, dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi lokal, perluasan kerja sama antar daerah, penguatan sistem distribusi pangan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, Bank Indonesia, Bulog, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,

mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempertahankan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan II Tahun 2026

A. Evaluasi Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan pasokan menunjukkan hasil yang cukup baik. Program Tanam Perdana Cabai Merah dan Tanam Perdana Bawang Merah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produksi komoditas hortikultura yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Selain itu, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Serdang Bedagai mampu memperkuat akses pasokan komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras sehingga risiko kekurangan pasokan dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, produksi beberapa komoditas hortikultura masih sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim sehingga ketersediaan pasokan belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi budidaya, penguatan cadangan pangan, serta perluasan kerja sama antar daerah perlu terus dilakukan.

B. Evaluasi Keterjangkauan Harga

Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilakukan TPID melalui pemantauan harga harian, pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta koordinasi dengan distributor telah membantu menjaga keterjangkauan harga sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat.

Namun demikian, komoditas kelompok volatile food, terutama cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tomat masih mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi akibat perubahan cuaca, keterbatasan pasokan, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga masih perlu diperkuat melalui peningkatan produksi lokal dan intervensi pasar yang lebih cepat.

C. Evaluasi Kelancaran Distribusi

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) menjadi salah satu kebijakan yang cukup efektif dalam meningkatkan kelancaran distribusi pangan antarwilayah. Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil memperluas jaringan pasokan komoditas strategis sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan risiko kelangkaan pasokan dapat

dikurangi.

Meskipun demikian, kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Selatan yang cukup luas serta infrastruktur transportasi yang belum merata masih menjadi tantangan dalam kelancaran distribusi pangan, terutama pada musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem logistik pangan, peningkatan infrastruktur jalan, serta optimalisasi distribusi berbasis data secara real time.

D. Evaluasi Komunikasi yang Efektif

TPID Kabupaten Tapanuli Selatan telah memanfaatkan Dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai media pemantauan harga harian serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data. Selain itu, koordinasi rutin dengan OPD, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, dan kelompok tani semakin memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah.

Walaupun demikian, pemanfaatan Dashboard IPH dan Early Warning System (EWS) masih perlu terus dioptimalkan agar mampu memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan prediktif sehingga kebijakan stabilisasi harga dapat dilaksanakan sebelum terjadi lonjakan harga yang signifikan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah. Rekomendasi kebijakan berikut disusun berdasarkan pendekatan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) sebagai pedoman bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Ketersediaan Pasokan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu terus meningkatkan produksi komoditas pangan strategis, khususnya cabai merah, bawang merah, tomat, dan komoditas hortikultura lainnya yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Program tanam serentak, perluasan luas tanam, peningkatan produktivitas lahan, serta pemanfaatan benih unggul perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi dengan Dinas Pertanian, kelompok tani, dan pemerintah provinsi.

Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) dengan sentra produksi pangan perlu diperluas guna menjamin ketersediaan pasokan pada saat terjadi penurunan produksi lokal. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan optimalisasi peran Bulog juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada hari besar keagamaan maupun kondisi darurat.

2. Keterjangkauan Harga

Upaya menjaga keterjangkauan harga perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas intervensi pasar terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan subsidi biaya distribusi pada komoditas strategis perlu dilakukan secara lebih terencana berdasarkan hasil pemantauan harga harian.

TPID juga perlu memperkuat koordinasi dengan distributor, pedagang besar, dan pelaku usaha untuk memastikan mekanisme pembentukan harga berlangsung secara wajar serta mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga.

3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem distribusi pangan melalui pengembangan jaringan logistik yang lebih efisien, peningkatan infrastruktur jalan menuju sentra produksi, serta optimalisasi kerja sama perdagangan antar daerah. Penyederhanaan rantai distribusi juga perlu dilakukan agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih stabil.

Di samping itu, sistem pemantauan stok dan distribusi berbasis digital perlu dikembangkan secara real time sehingga potensi gangguan distribusi dapat dideteksi lebih awal dan segera ditindaklanjuti oleh TPID.

4. Komunikasi yang Efektif

Pemanfaatan Dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Early Warning System (EWS) perlu terus dioptimalkan sebagai pusat informasi harga dan dasar pengambilan keputusan. Seluruh anggota TPID diharapkan melakukan pemantauan harga secara rutin sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat.

Selain itu, komunikasi publik mengenai perkembangan harga, ketersediaan stok pangan, dan pelaksanaan program stabilisasi perlu ditingkatkan melalui media massa, media sosial, dan kanal informasi pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan (*panic buying*).